

Kriminologi: Budaya dan Dinamika Penegakan Hukum di Masyarakat Multikultural

Hamidah Ulfa Fauziah^{a,1}, Moh. Dwi Prayoga^{b,2}, Diana Rista^{c,3}, Ety Andyastuti^{d,4}, Wikan Sasmita^{e,5}, Azra'i Mahendra^{f,6}, Peni Sekarsari^{g,7}, Fitta Nurisma Riswandi^{h,8}

^{a,g}Universitas Negeri Yogyakarta, Jl. Colombo No.1, Karang Malang, Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, Indonesia

^{b,c,d,e,f}Universitas Nusantara PGRI Kediri, Jl. Ahmad Dahlan No.76, No.76, Mojoroto, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur, 64112, Indonesia

^hUniversitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri, Jl. KH Wachid Hasyim No.62, Bandar Lor, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur 64114, Indonesia

¹hamidah0023fishipol.2023@student.uny.ac.id; ²muhamaddwi119@gmail.com; ³dirystarysta@gmail.com;

⁴azrmhen@gmail.com; ⁵wikam.sasmita@unpkediri.ac.id; ⁶ettyandyastuty@unpkediri.ac.id;

⁷penisekarsari.2023@student.uny.ac.id; ⁸fitta@uit-lirboyo.ac.id

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima: 16 September 2025

Direvisi: 18 Oktober 2025

Disetujui: 20 November 2025

Tersedia Daring: 1 Desember 2025

Kata Kunci:

Kriminologi

Kebergaman budaya

Multikultural

ABSTRAK

Studi kriminologi memainkan peran penting dalam masyarakat multikultural yang ditandai oleh keragaman etnis, budaya, dan nilai-nilai. Kriminologi dalam konteks ini tidak hanya membahas faktor-faktor yang memengaruhi perilaku kriminal, tetapi juga bagaimana budaya memengaruhi persepsi terhadap kejahatan dan penegakan hukum. Artikel ini mengeksplorasi bagaimana kriminologi dapat memberikan wawasan mendalam mengenai dinamika budaya dalam penegakan hukum, serta tantangan dan prospeknya di masa depan. Penelitian ini menyoroti pentingnya strategi penegakan hukum yang inklusif dan responsif terhadap keragaman budaya, serta mengusulkan integrasi antara kriminologi dan antropologi budaya guna merancang kebijakan yang mempertimbangkan nilai-nilai lokal, sehingga diharapkan dapat memperkuat keadilan sosial dan hukum dalam masyarakat yang semakin kompleks. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yakni dengan mengumpulkan dan menelaah berbagai literatur relevan yang ditulis oleh peneliti sebelumnya dan memiliki keterkaitan erat dengan isu yang dibahas dalam penelitian ini.

ABSTRACT

Keywords:

Criminology

Cultural Diversity

Multiculturalism

Criminology plays a crucial role in multicultural societies characterized by ethnic, cultural, and value-based diversity. In this context, criminology not only addresses the factors influencing criminal behavior but also explores how culture shapes perceptions of crime and law enforcement. This article investigates how criminology can provide deep insights into cultural dynamics within law enforcement practices, as well as the challenges and prospects for the future. The study emphasizes the importance of inclusive and culturally responsive law enforcement strategies and proposes the integration of criminology and cultural anthropology to develop policies that take local values into account. Such integration is expected to strengthen social and legal justice in increasingly complex societies. The data collection method used in this study is a literature review, which involves gathering and analyzing relevant works by previous researchers whose studies relate closely to the issues discussed.



1. Pendahuluan

Kriminologi, sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan dan respons terhadapnya, memiliki peran krusial dalam masyarakat multikultural yang diwarnai oleh keragaman etnis, budaya, dan nilai-nilai. Studi ini tidak hanya mencakup analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kriminal, tetapi juga bagaimana budaya memengaruhi pandangan terhadap kejahatan dan sistem hukum. Dalam konteks ini, nilai-nilai budaya, norma, dan tradisi tidak hanya membentuk persepsi terhadap tindakan kriminal tetapi juga mempengaruhi cara penegakan hukum dan kebijakan pencegahan kejahatan. Penegakan hukum di masyarakat multikultural menghadapi tantangan karena adanya variasi dalam interpretasi hukum dan norma budaya. Ini menciptakan kesempatan untuk pengembangan strategi penegakan hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap kompleksitas budaya. Pendekatan yang menggabungkan pengetahuan kriminologi dengan antropologi budaya dapat membantu dalam merancang kebijakan terhadap nilai-nilai budaya lokal. Oleh karena itu, artikel ini akan menggali lebih dalam bagaimana kriminologi dapat membantu memahami dinamika budaya dalam konteks penegakan hukum, serta tantangan dan prospeknya di masa depan. Dengan mempertimbangkan kompleksitas ini, penelitian kriminologi tidak hanya mengeksplorasi faktor-faktor budaya yang mempengaruhi kejahatan tetapi juga memberikan landasan untuk pembangunan kebijakan yang mendukung penegakan hukum yang lebih adil dan efektif di masyarakat multikultural. Ini penting untuk memastikan bahwa sistem hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan aturan, tetapi juga sebagai cermin dari nilai-nilai budaya yang diakui secara luas. Dengan demikian, artikel ini akan menguraikan bagaimana integrasi kriminologi dengan konteks budaya dapat memperkuat keadilan sosial dan hukum dalam masyarakat yang semakin kompleks ini.

2. Metode

Pembuatan penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan yang dilakukan yaitu dengan cara mengumpulkan data dengan membaca dan menelaah literatur yang telah dikemukakan oleh peneliti lain yang berhubungan dengan topik dan masalah yang berhubungan erat dengan permasalahan yang dikemukakan. Beberapa jenis literatur yang digunakan terdiri atas buku-buku atau jurnal mengenai Pancasila dan sistem filsafat serta sumber lain yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan (Prayoga et al., 2024). Teknik pengumpulan data dengan melakukan analisis lanjutan terhadap hasil data yang telah ditemukan sebelumnya dengan menggunakan teori dan metode sehingga ditemukan kesimpulan yang merupakan hasil jawaban dari rumusan masalah yang telah ditemukan. Data yang diperoleh tersebut didapatkan dari literatur yang dapat dipertanggungjawabkan yang kemudian disusun dan dituliskan berdasarkan hasil studi kasus sehingga berkaitan dengan permasalahan yang ditemukan sehingga sesuai dengan tema yang dibahas pada artikel ini (Prayoga et al., 2025). Penarikan simpulan diperoleh dari hasil merujuk pada rumusan masalah, tujuan penulisan, dan analisis. Simpulan juga memperhatikan penyajian data dari pembahasan yang ditarik pada pokok-pokok pembahasan dalam artikel ini serta didukung dengan saran sebagai bahan acuan dan rekomendasi selanjutnya.

3. Hasil dan Pembahasan

Peran Kriminologi dalam Masyarakat Multikultural

Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan, penyebabnya, serta respons masyarakat terhadap kejahatan tersebut. Bidang ini melibatkan analisis terhadap berbagai faktor yang berkontribusi pada perilaku kriminal, termasuk aspek sosial, psikologis, ekonomi, dan budaya. Kriminologi juga mencakup studi tentang sistem peradilan pidana, kebijakan penegakan hukum, dan efektivitas berbagai pendekatan dalam mencegah dan menangani kejahatan. Dalam masyarakat multikultural, kriminologi memainkan peran penting dalam memahami bagaimana berbagai budaya mempengaruhi pandangan tentang kejahatan dan cara-cara penanganannya. (Batjo, 2024). Budaya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku manusia, termasuk dalam konteks kriminalitas. Nilai-nilai budaya, norma, dan tradisi dapat membentuk persepsi individu tentang apa yang dianggap sebagai perilaku yang dapat diterima atau tidak dapat diterima. Dalam masyarakat multikultural, di mana berbagai kelompok etnis dan budaya hidup berdampingan, perbedaan ini dapat menciptakan tantangan unik dalam penegakan hukum. (Nugraha, 2024) Kriminologi membantu dalam mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana perbedaan budaya ini mempengaruhi tingkat kriminalitas, pola-pola kejahatan, dan interaksi antara komunitas dan aparat penegak hukum. Selain itu, kriminologi juga mengeksplorasi bagaimana sistem hukum dapat diadaptasi untuk lebih efektif dalam masyarakat yang beragam secara budaya. Penegakan hukum yang sensitif terhadap budaya dan inklusif dapat membantu mengurangi ketegangan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Misalnya, pendekatan yang melibatkan mediator budaya atau pelatihan kesadaran budaya bagi petugas penegak hukum dapat meningkatkan pemahaman dan komunikasi antara pihak berwenang dan komunitas multikultural. Dengan demikian, kriminologi tidak hanya berfokus pada aspek teoritis kejahatan, tetapi juga pada implementasi praktis dari kebijakan dan strategi yang dapat mengatasi kompleksitas yang timbul dari keragaman budaya dalam penegakan hukum

Keragaman Budaya dalam Penegakan Hukum di Masyarakat Multikultural

Budaya adalah kumpulan nilai, norma, kepercayaan, adat istiadat, dan simbol yang dibagikan oleh anggota suatu kelompok masyarakat, dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk bahasa, agama, seni, hukum, moral, dan cara berpikir. (Kusherdiana, 2020) Unsur-unsur budaya ini saling berinteraksi untuk membentuk identitas individu dan kelompok serta memengaruhi cara mereka berinteraksi dengan dunia di sekitar mereka. Multikulturalisme, di sisi lain, adalah konsep yang merujuk pada pengakuan dan penghargaan terhadap keberagaman budaya dalam suatu masyarakat. Ini berarti menghormati perbedaan budaya dan memastikan bahwa tidak ada kelompok budaya yang didiskriminasi atau diabaikan. Multikulturalisme mendorong kerjasama dan pengertian di antara berbagai kelompok budaya, yang pada akhirnya dapat memperkaya pengalaman kolektif masyarakat (Alfindo, 2023). Masyarakat multikultural dicirikan oleh keragaman etnis, agama, bahasa, dan nilai-nilai yang ada di dalamnya. Keragaman etnis mengacu pada keberadaan berbagai kelompok etnis yang berbeda dalam satu masyarakat, masing-masing dengan identitas budaya mereka sendiri. Keragaman agama mencakup berbagai kepercayaan dan praktik keagamaan yang dianut oleh anggota masyarakat. Keragaman bahasa menunjukkan adanya berbagai bahasa yang digunakan oleh masyarakat, baik sebagai bahasa ibu maupun sebagai bahasa kedua. Selain itu, nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat multikultural dapat sangat bervariasi, mencerminkan berbagai pandangan tentang kehidupan, moralitas, dan etika. Karakteristik ini menciptakan dinamika sosial yang kaya, tetapi juga menimbulkan tantangan dalam menciptakan keharmonisan dan kesatuan (Subandi, 2017).

Penegakan hukum di masyarakat multikultural menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Salah satu tantangan utama adalah adanya kesalahpahaman budaya, di mana norma dan praktik hukum yang berlaku di satu kelompok budaya mungkin tidak dipahami atau bahkan bertentangan dengan norma budaya lain. (Ngai, 2024) Hal ini dapat menyebabkan konflik dan ketegangan antar kelompok. Selain itu, norma hukum yang berbeda di setiap budaya juga dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakadilan. Misalnya, hukum adat yang dihormati oleh satu kelompok etnis mungkin tidak diakui oleh sistem hukum negara, yang bisa menyebabkan benturan kepentingan. Potensi diskriminasi juga menjadi tantangan besar, di mana penegakan hukum bisa bias terhadap kelompok tertentu, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, yang dapat memperburuk ketidakadilan sosial dan memperkuat stereotip negatif. Untuk mengatasi tantangan dalam masyarakat multikultural, penting untuk mempromosikan dialog antar budaya dan pendidikan tentang keberagaman. Ini dapat membantu meningkatkan pemahaman dan penghargaan terhadap perbedaan budaya serta mengurangi kesalahpahaman. Penegakan hukum juga perlu lebih inklusif dan adil, dengan memperhatikan kepekaan budaya dan tidak diskriminatif. Pengembangan kebijakan yang memperhitungkan kebutuhan dan hak semua kelompok budaya juga sangat penting untuk memastikan bahwa tidak ada kelompok yang merasa diabaikan atau diperlakukan tidak adil. Dengan demikian, masyarakat multikultural dapat hidup berdampingan dengan harmonis, saling menghormati, dan bekerja sama untuk kesejahteraan bersama.

Dinamika Budaya dan Pengaruhnya pada Penegakan Hukum

Budaya memiliki pengaruh yang signifikan dalam pembentukan, interpretasi, dan penerapan hukum di berbagai negara. Budaya mencakup norma, nilai, dan keyakinan yang dianut oleh masyarakat dan dapat membentuk dasar etika dan moralitas yang pada akhirnya mempengaruhi pembuatan hukum. Misalnya, norma budaya yang menghargai kehidupan dan properti pribadi bisa tercermin dalam undang-undang yang melindungi hak-hak individu. Selain itu, interpretasi hukum juga dipengaruhi oleh konteks budaya. Hakim dan penegak hukum sering kali memandang kasus dengan lensa budaya mereka sendiri, yang dapat mempengaruhi cara mereka menafsirkan hukum dan menentukan hukuman. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang budaya setempat sangat penting dalam menciptakan sistem hukum yang adil dan efektif. Budaya juga dapat memainkan peran penting dalam membentuk perilaku kriminal. Norma dan nilai yang dianut oleh suatu budaya dapat mempengaruhi kecenderungan individu atau kelompok untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum. (Sari, 2018) Misalnya, budaya yang sangat menghargai kehormatan keluarga mungkin lebih cenderung melaporkan kasus kekerasan domestik daripada budaya yang menilai privasi keluarga sebagai hal yang tidak boleh diganggu. Di sisi lain, beberapa norma budaya mungkin secara tidak langsung mendukung perilaku kriminal, seperti norma yang memandang suap sebagai cara yang dapat diterima untuk mendapatkan keuntungan. Dalam hal ini, memahami hubungan antara budaya dan perilaku kriminal dapat membantu penegak hukum untuk mengidentifikasi faktor-faktor risiko dan mengembangkan strategi pencegahan yang lebih efektif.

Budaya juga memengaruhi persepsi masyarakat terhadap hukum, aparat penegak hukum, dan sistem peradilan pidana. Di banyak masyarakat, hukum dilihat tidak hanya sebagai aturan yang harus diikuti, tetapi juga sebagai cerminan dari nilai-nilai budaya yang mendasarinya. Jika hukum dianggap selaras dengan nilai-nilai budaya setempat, maka masyarakat cenderung lebih menghormati dan mematuhi hukum tersebut. Sebaliknya, jika hukum dianggap bertentangan dengan nilai-nilai budaya atau tidak adil, maka kepercayaan masyarakat terhadap hukum bisa menurun. (Jayantiari, 2020) Selain itu, persepsi terhadap aparat penegak hukum

juga dipengaruhi oleh budaya. Di beberapa budaya, aparat penegak hukum mungkin dihormati dan dipandang sebagai pelindung masyarakat, sementara di budaya lain mereka mungkin dianggap korup atau tidak adil. Oleh karena itu, membangun kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan aparat penegak hukum memerlukan pendekatan yang peka terhadap budaya. Penegakan hukum dalam masyarakat multikultural menghadirkan tantangan dan peluang tersendiri. Tantangannya termasuk memahami dan menghormati perbedaan budaya yang dapat mempengaruhi perilaku dan pandangan terhadap hukum. Misalnya, praktik hukum yang mungkin dianggap adil dalam satu budaya bisa dianggap diskriminatif dalam budaya lain. Namun, dengan pendekatan yang tepat, penegakan hukum juga dapat menjadi sarana untuk mempromosikan harmoni sosial dan pengertian budaya. Aparat penegak hukum yang dilatih untuk bekerja dengan berbagai komunitas budaya dapat membantu mengurangi ketegangan sosial dan membangun kepercayaan antara kelompok yang berbeda. Oleh karena itu, penegakan hukum yang efektif memerlukan pemahaman mendalam tentang dinamika budaya dan kemampuan untuk beradaptasi dengan konteks multikultural.

Strategi Penegakan Hukum Yang Efektif Dalam Masyarakat Multikultural melalui Pendekatan Kriminologi

Strategi penegakan hukum yang efektif dalam masyarakat multikultural didasarkan pada pemahaman mendalam yang ditawarkan oleh kriminologi tentang interaksi antara budaya dan kejahatan. Kriminologi membantu mengidentifikasi bagaimana nilai-nilai budaya, norma sosial, dan tradisi lokal mempengaruhi perilaku kriminal serta persepsi masyarakat terhadap hukum. (James, 2023) Misalnya, dalam beberapa budaya terdapat tindakan yang dianggap ilegal menurut hukum formal, namun dianggap dapat diterima atau bahkan dihormati dalam konteks budaya tersebut. Penegakan hukum yang tidak mempertimbangkan perbedaan ini dapat mengakibatkan ketegangan dan kurangnya kepercayaan di antara masyarakat multikultural. Oleh karena itu, strategi penegakan hukum yang efektif harus melibatkan penelitian kriminologi untuk memahami konteks budaya dari berbagai kelompok masyarakat dan mengadaptasi pendekatan penegakan hukum yang sensitif serta responsif terhadap keragaman ini. Dalam upaya melakukan Penegakan hukum yang efektif di masyarakat multikultural pemerintah telah berusaha menghadirkan hukum yang adil dan berlaku untuk semua warga negara Indonesia dengan tidak memandang ras, etnis, adat istiadat maupun budaya dalam masyarakat, karena Indonesia negara yang majemuk terdiri dari berbagai masyarakat yang bermacam macam adat, etnis maupun budaya yang berbeda sehingga penegakan hukum perlu di tegakkan seadil adilnya, jika suatu hukum tidak dilaksanakan dengan baik maka hal ini dapat berakibat pada ketidak puasan masyarakat yang apalagi jika hukum tersebut tidak dilaksanakan dengan baik pada suatu ras, etnis, atau golongan pada suatu masyarakat, sehingga masyarakat berasumsi bahwa suatu golongan masyarakat tertentu merupakan masyarakat yang kebal akan hukum. Selain itu, dalam kriminologi menekankan pentingnya inklusivitas dan keadilan dalam penegakan hukum di masyarakat multikultural. Penegakan hukum yang efektif tidak hanya berfokus pada penerapan hukum secara ketat, tetapi juga pada pembangunan hubungan yang kuat antara aparat penegak hukum dan komunitas yang beragam. Kriminologi menyarankan penggunaan pendekatan berbasis komunitas yang melibatkan partisipasi aktif dari berbagai kelompok budaya untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kriminalitas.

Beberapa strategi dalam kriminologi yang dapat diterapkan untuk mencapai penegakan hukum yang efektif dalam masyarakat multikultural meliputi:

1. Analisis Kriminologis Berbasis Budaya
Melakukan analisis mendalam terhadap faktor-faktor budaya yang mempengaruhi pola kejahatan di berbagai kelompok etnis dan budaya. (Mardianto, 2024) Ini mencakup memahami nilai-nilai budaya, norma sosial, dan praktik keagamaan yang dapat memengaruhi perilaku kriminal serta respons terhadap hukum.
2. Kolaborasi dengan Disiplin Ilmu Lain
Mengintegrasikan pendekatan kriminologi dengan disiplin ilmu lain seperti antropologi budaya, sosiologi, dan psikologi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih holistik tentang dinamika kejahatan dalam konteks multikultural. Pendekatan ini membantu dalam merancang kebijakan penegakan hukum yang lebih adaptif dan responsif terhadap kompleksitas budaya.
3. Pendekatan Restoratif
Mengadopsi pendekatan restoratif dalam penegakan hukum untuk mempromosikan rekonsiliasi dan restitusi di antara korban, pelaku, dan komunitas. Pendekatan ini dapat memperkuat kepercayaan antara berbagai kelompok budaya dan meningkatkan kesejahteraan bersama dalam masyarakat multikultural. (Setyowati, 2020).
4. Pendidikan dan Pelatihan
Menyediakan pendidikan dan pelatihan kepada aparat penegak hukum tentang keberagaman budaya, kesadaran antarbudaya, dan teknik komunikasi yang efektif dengan komunitas multikultural. Ini membantu dalam mengurangi kesalahpahaman budaya dan mempromosikan penegakan hukum yang lebih adil dan inklusif.
5. Penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif
Penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif merupakan pilar dalam terciptanya keadilan sosial dan hukum bagi masyarakat, hal ini jika hukum ditegakkan secara sama dan konsisten kepada semua orang tanpa memandang ras, budaya, maupun kelompok dapat terciptanya kepercayaan masyarakat akan hukum yang berlaku di Indonesia.
6. Transparansi hukum
Transparansi hukum pada masyarakat multikultural memegang peran yang sangat penting dalam menciptakan suasana yang adil dan persamaan hukum bagi Masyarakat. Perlunya peningkatan akses terhadap informasi hukum di kalangan masyarakat sangat penting dalam upaya peningkatan keadilan hukum di masyarakat yang majemuk. Informasi informasi tersebut bisa dilakukan melalui internet media sosial, televisi serta sosialisasi pada Masyarakat. Transparansi hukum dapat meningkatkan rasa keadilan dan persamaan hukum pada semua masyarakat tanpa memandang golongan tertentu. Selain itu transparansi hukum dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum (Santoso, 2023).

Tantangan dan prospek penegakan hukum melalui pendekatan kriminologi di masa depan terhadap masyarakat multikultural

Tantangan dan prospek penegakan hukum melalui pendekatan kriminologi di masa depan terhadap masyarakat multikultural menunjukkan kompleksitas yang harus diatasi untuk mencapai keadilan yang inklusif dan berkelanjutan. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan budaya yang mempengaruhi cara pandang terhadap kejahatan. Dalam masyarakat multikultural, apa yang dianggap sebagai tindakan ilegal oleh hukum formal sering kali memiliki penafsiran yang berbeda atau bahkan dihormati dalam konteks budaya tertentu. (Lukito, 2008) Hal ini menciptakan ketegangan antara norma hukum nasional dan nilai-nilai budaya lokal, yang memerlukan pendekatan penegakan hukum yang lebih peka dan adaptif. Prospek untuk masa depan melibatkan pengembangan strategi penegakan hukum yang lebih inklusif. Ini mencakup integrasi prinsip-prinsip kriminologi yang mempertimbangkan

perbedaan budaya dalam pembuatan kebijakan hukum dan strategi penegakan. Dengan memahami lebih mendalam konteks budaya dari berbagai komunitas, sistem hukum dapat menyesuaikan pendekatannya untuk lebih memperhitungkan nilai-nilai lokal tanpa mengorbankan prinsip-prinsip hukum yang mendasar.

Selain itu, tantangan lainnya adalah ketidakseimbangan kekuasaan antara aparat penegak hukum dan komunitas multikultural. Hal ini dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap keadilan sistem hukum dan membuka peluang bagi diskriminasi atau penyalahgunaan kekuasaan. Prospek di masa depan melibatkan penguatan dialog dan keterlibatan aktif komunitas dalam proses penegakan hukum. Dengan mendorong partisipasi publik yang lebih luas, sistem hukum dapat membangun kepercayaan yang lebih kokoh dan mempromosikan pemahaman yang lebih baik tentang peran dan tanggung jawab bersama dalam memelihara ketertiban sosial. (Dzuhayatin, 2014). Kriminologi dapat menjadi alat yang penting dalam menghadapi tantangan dan meraih prospek di masa depan melalui pendekatan dalam membangun jembatan antara hukum formal dan nilai-nilai budaya. Dengan menganalisis lebih dalam faktor-faktor sosial, ekonomi, psikologis, dan budaya yang mempengaruhi perilaku kriminal, kriminologi dapat membantu merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam penegakan hukum. Ini tidak hanya memperkuat sistem hukum yang ada tetapi juga meningkatkan keadilan dalam masyarakat multikultural yang semakin kompleks dan terhubung secara global (Yuzani, 2024).

4. Kesimpulan

Penegakan hukum yang efektif dalam masyarakat multikultural membutuhkan pendekatan yang berpusat pada masyarakat. Dengan meningkatkan kapasitas dan pemahaman budaya, menerapkan pendekatan yang berpusat pada masyarakat, menegakkan hukum secara sensitif terhadap budaya agar hukum dapat diterima dan ditegakkan di masyarakat, memastikan keadilan dan non-diskriminasi, serta membangun akuntabilitas dan transparansi dalam upaya menegakkan hukum yang baik, para aparat penegak hukum juga dapat memainkan peran yang penting dalam membangun masyarakat yang aman, adil bagi semuanya, sehingga penegak hukum dapat memainkan peran penting dalam membangun masyarakat yang aman, dan inklusif bagi semuanya. Budaya hukum juga penting dalam membangun masyarakat yang adil, untuk membangun budaya hukum membutuhkan upaya bersama dari semua pihak dari pemerintah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat itu sendiri.

5. Daftar Pustaka

- Alfindo, A. (2023). Pentingnya Nilai-Nilai Pendidikan Multikultural Dalam Masyarakat. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 25.1, 242-251.
- Batjo, F. S. (2024). Kajian Kriminologi terhadap Pelaku Kejahatan Pembunuhan di Kabupaten Pulau Taliabu Maluku Utara (Studi Sosial Taliabu Barat). *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 6.2.
- Dzuhayatin, S. R. (2014). Hukum dan Kebinnekaan Sebagai Karakter Bangsa Indonesia (Upaya Mempertahankan Multikulturalisme). 58-78.
- James, G. (2023). *Pengantar Kriminologi*. Gilad James Mystery School.
- Jayantiari, I. G. (2020). Pembangunan Hukum Berorientasi Keadilan Melalui Harmonisasi Hukum Negara dan Hukum Ada. *Jurnal Majelis* 2.1, 151-174.



- Kusherdiana, R. (2020). Pengertian Budaya, Lintas Budaya, dan Teori yang Melandasi Lintas Budaya. *Pemahaman Lintas Budaya SPAR4103/MODUL 1.1* , 1-63.
- Lukito, R. (2008). Hukum sakral dan kukum sekuler: Studi tentang konflik dan resolusi dalam sistem hukum Indonesia. *Pustaka Alvabet*.
- Mardianto, E. e. (2024). Tinjauan Teoritis Pola Pembelajaran Kelompok Kriminal dalam Perspektif Differential Association Theory: Studi Kasus “Geng Kapak Merah” di Jakarta. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi 3.3*, 596-602.
- Ngai, M. S. (2024). Tantangan Implementasi Hukum di Lingkungan Masyarakat Beragam Budaya. *JESD: Journal of Education Social and Development 1.1*, 79-86.
- Nugraha, Z. A. (2024). Tantangan Multikulturalisme Dalam Dinamika Masyarakat Urban. *Jurnal Ilmu Multidisplin 3.1*, 69-74.
- Santoso, G. A. (2023). Kajian Penegakan Hukum di Indonesia untuk Membentuk Perdamaian dalam Bhinneka Tunggal Ika Indonesia Abad 21. *Jurnal Pendidikan Transformatif 2.1*, 210-223.
- Sari, R. N. (2018). Pengaruh Budaya Etis Organisasi, Penegakan Hukum dan Asimetri Informasi terhadap Kecendrungan Kecurangan Akuntansi (fraud)(Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang Panjang). *Jurnal Akuntansi 6.3*, Jurnal Akuntansi 6.3 .
- Setyowati, D. (2020). Memahami Konsep Restorative Justice sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan. *Pandecta research law journal 15.1*, 121-141.
- Subandi, S. (2017). Menderadikalisasi Faham Radikal Melalui Pendidikan Multikultur dan Karakter Lokal di Lampung. *FIKRI: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya 2.2*, 457-484.
- Yuzani, D. A. (2024). Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi terhadap Tingkat Kriminalitas: Analisis di Kota Tanjungpinang. *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum 1.4*, 165-173.
- Prayoga, M. D., Sasmita, W., & Mahendra, A. (2025). Pembelajaran Mendalam: Penekanan Pada Proses Pembelajaran Untuk Meningkatkan Hasil Penilaian Belajar Siswa. *Philosophiamundi, 3(3)*, 548-554.
- Prayoga, M. D., Rista, D., Sari, H. T. W., Irfan, A., & Nursalim, N. (2024, October). Diplomasi Anti Korupsi: Strategi Indonesia dalam Mempromosikan Good Governance di Kawasan Asia Tenggara. In *Prosiding Seminar Nasional Kesehatan, Sains dan Pembelajaran* (Vol. 4, No. 1, pp. 155-164).